



LEMHANNAS RI
THE NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 95, Juni 2017



Gubernur Lemhannas RI Merespon Tren Perubahan Politik Global (hal 04)

05

Orasi Ilmiah Warnai Peringatan
Ulang Tahun **Lemhannas RI**

07

Chatib Basri: ASEAN
Kemungkinan Hadapi Fenomena
New Normal Economy

10

Mohammad Aboelfadl :
Pendidikan Kunci Tangani
Ekstremisme

daftar isi

- 3 **Sosialisasi PPRA** bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
- 4 **Gubernur Lemhannas RI** Merespon Tren Perubahan Politik Global
- 5 **Orasi Ilmiah** Warnai Peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI
- 6 **NKRI** Terbentuk dengan Kesukarelaan
- 7 **Chatib Basri:** ASEAN Kemungkinan Hadapi Fenomena *New Normal Economy*
- 8 **Oleg N. Barabanov:** *Tiongkok Sebagai Gerbang Utama Asia Pasifik*
- 9 **Satoru Mori:** Indonesia Sudah di Jalan yang Benar
- 10 **Mohammad Aboelfadl:** Pendidikan Kunci Tangani Ekstremisme
- 11 **Arif Havas Oegroseno:** Perubahan Iklim Perlu Diwaspadai
- 12 **Nurşin Ateşoğlu Güney:** Para Pengungsi harus Diberdayakan

tim redaksi

Pengarah:

Arif Wachyunadi

Penanggung Jawab:

Mindarto

Redaktur Pelaksana:

Wahyu Widji Pamungkas

Penyunting/Editor:

Bambang Iman Aryanto

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Bambang Iman Aryanto**

Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot**

Distribusi: **Supriyono, Ayu Novitasari**

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI,

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109**

Fax. **(021) 3451926**

Website **<http://www.lemhannas.go.id>**

Selamat Idul Fitri 1438H

Mohon Maaf Lahir & Batin



Sosialisasi PPRA bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah



Pendidikan Lemhannas RI memiliki tujuan untuk menyiapkan para pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan strategis untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan bangsa secara komprehensif, untuk itu tiap tahun Lemhannas RI membuka program pendidikan Lemhannas RI guna menciptakan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang lebih banyak lagi. Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Ivan R. Pelealu, SE, MM, dalam sambutannya pada Rabu (17/5) dan Kamis (18/5) dalam acara sosialisasi program PPRA LVII & LVIII TA. 2018 Lemhannas RI.

Penyelenggaraan sosialisasi program pendidikan PPRA LVII & LVIII yang dilaksanakan di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lt. III bertujuan untuk menginformasikan tentang ketentuan dan persyaratan bagi calon peserta program pendidikan Lemhannas RI.

Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan instansi pemerintah sebanyak 85 peserta dan perwakilan dari instansi non pemerintah sebanyak 54 peserta. Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA sebagai narasumber memberikan paparan materi sosialisasi tentang ketentuan dan persyaratan bagi calon peserta program pendidikan Lemhannas RI, serta dijelaskan pula

substansi tentang pelaksanaan pada program pendidikan yang ada di Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Dadan Umar menjelaskan syarat – syarat untuk dapat menjadi peserta PPRA, yaitu diantaranya adalah calon peserta minimal berpangkat Pembina Tk.I (eselon II) untuk PNS dan Kolonel/Komisaris Besar untuk (TNI/Polri), Lulus Diklatpim Tk. II untuk PNS dan Sesko Angkatan/Sespim Polri, Minimal 5 tahun bagi yang berasal dari organisasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi agama maupun LSM lainnya. Sementara pengajuan calon peserta diusulkan dari instansi dan organisasi asalnya.

PPRA yang diselenggarakan selama tujuh bulan menggunakan metode on campus dan off campus. Selain itu juga selama menempuh pendidikan para peserta akan melaksanakan beberapa kegiatan utama seperti Kuliah Umum, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Luar Negeri (SSLN), Program Pilihan kementerian maupun institusim olah sistem manajemen nasional (Sismennas), Penulisan dan Penyajian Kertas Karya Perorangan (Taskap) dan Seminar PPRA.

Diharapkan bagi perwakilan instansi yang hadir mengikuti sosialisasi ini dapat memberikan informasi ke instansinya masing-masing tentang program pendidikan Lemhannas RI pada tahun 2018. ●

Gubernur Lemhannas RI Merespon Trend Perubahan Politik Global



kenalilah tanah airmu, ciptakanlah strategi untuk pembangunan dan strategi untuk pertahanan berdasarkan kepada kondisi geopolitismu,” ujar Agus. Karena menurutnya Situasi Geopolitik Internasional sangat erat kaitannya dengan kondisi nasional saat ini dan di masa yang akan datang.

Agus Widjojo menjelaskan bahwa ketahanan nasional ialah respon suatu negara terhadap tantangan, halangan, ataupun ancaman. Banyak perubahan geopolitik yang terjadi bergerak secara dinamis dan tidak terprediksi sehingga dapat membawa keketidapan. “Banyak perubahan terjadi di berbagai tempat. Karena itu lah Lemhannas akan selalu menjadi garda terdepan mengkaji berbagai tantangan dan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional”, tegas Agus Widjojo.

Gubernur Lemhannas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo menyampaikan pidato sambutan dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) pada Jumat (19/5). Dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta ini Agus Widjojo menyinggung mengenai urgensi didirikannya Lemhannas pada tanggal 20 Mei 1965. Lemhannas, lanjut Agus Widjojo, didirikan karena adanya kebutuhan akan studi geopolitik.

Agus Widjojo mengatakan Lemhannas merupakan sebuah lembaga yang memberikan perhatian dalam mempelajari dan memahami geopolitik nasional, regional, maupun global melalui pelaksanaan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional maupun pengkajian strategis ketahanan nasional. Selama 52 tahun berkiprah, menurutnya, Lemhannas RI telah berhasil meraih capaian-capaian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Trend perubahan geopolitik global mempengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa dalam aspek keamanan global, ekonomi, politik, terorisme, radikalisme, dan pengungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan selalu kajian strategis geopolitik untuk mengembangkan gagasan utama akan kepedulian terhadap kondisi nasional dalam mengembangkan doktrin ketahanan nasional dan wawasan nasional.

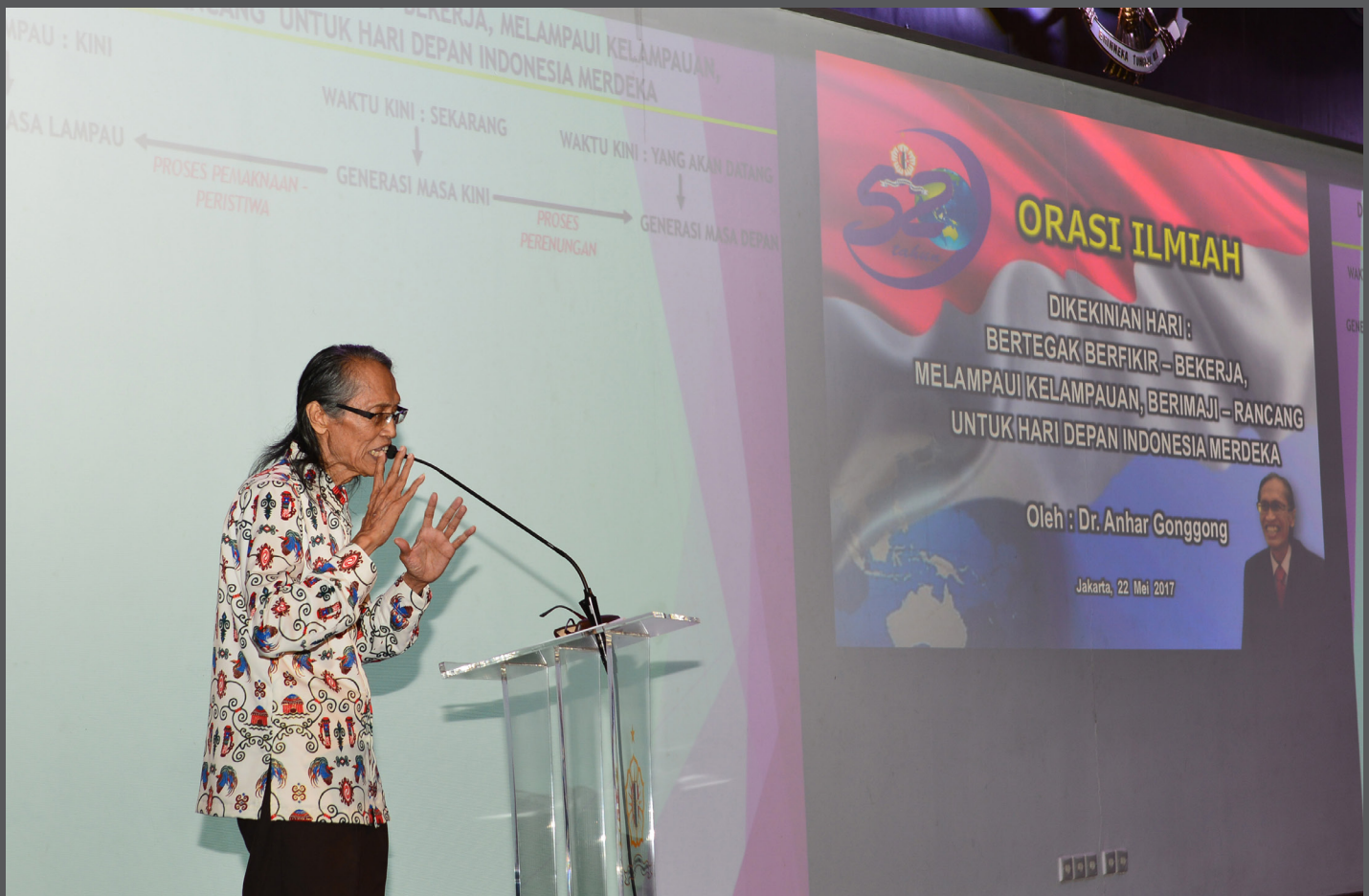
“Kenali dirimu, kenali negaramu, kenalilah pulau-pulaumu,

Lebih lanjut lagi, mantan Deputi Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) ini menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait dengan radikalisme pasca berakhirnya Pilkada DKI. “Kita belum selesai transisi demokrasi. Transisi demokrasi akan berhasil apabila semua orang percaya kepada kaidah demokrasi. Masih banyak masyarakat kita yang percaya bahwa dapat mencari solusi di luar kaidah demokrasi. Hal tersebut sangat berpengaruh”, pungkask Agus Widjojo.

Menurut Agus Widjojo, masalah radikalisme terjadi karena undang-undang belum dapat mendefinisikan dengan lebih spesifik masalah bagaimana yang melanggar dan bagaimana yang tidak. “Undang-undang itu harus didefinisikan dan terukur. Bagaimana seseorang itu melanggar undang-undang”, ujar Agus. Hal tersebut menurut Agus Widjojo merupakan sebuah hal yang penting mengingat supremasi hukum harus ditegakkan untuk menghadapi masalah radikalisme.

Melalui Jakarta Geopolitical Forum, Agus Widjojo berharap Indonesia dapat memiliki kajian yang komprehensif dalam merespon berbagai perkembangan lingkungan strategis dunia karena mendapatkan pandangan dari 22 pembicara kompeten yang terdiri dari 17 pembicara luar negeri dari Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Tiongkok, Jepang, Australia, Austria, Inggris, Turki, Singapura, Perancis, Mesir, dan 5 pembicara dalam negeri agar siap menghadapi tantangan dan ancaman dari pengaruh situasi geopolitik Internasional. ●

Orasi Ilmiah Warnai Peringatan Ulang Tahun **Lemhannas RI**



Sebagai salah satu rangkaian peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI, Orasi Ilmiah digelar di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung pancagatra Lantai IV, Lemhannas RI pada Senin (22/5). Orasi Ilmiah tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa perkembangan globalisasi dan demokratisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang turut mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa ini di masa yang akan datang.

Selain itu, lanjut Agus Widjojo, bangsa ini juga tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu – isu regional maupun global. Potensi ancaman tersebut kini tidak hanya

bersifat fisik, namun juga perang yang dilakukan oleh pihak ketiga (*proxy war*).

Agus Widjojo menekankan bahwa hal tersebut memberikan dampak besar kepada ketahanan nasional bangsa dalam aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Maka dari itu, Agus Widjojo berharap orasi ilmiah ini akan memberikan perluasan dan pencerahan wawasan serta cara pandang kita dalam menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks demi masa depan bangsa.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan Orasi Ilmiah oleh Dr. Anhar Gonggong, Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI dengan judul Orasi “Bertegak Berfikir – Bekerja, Melampaui Kelampauan, Berimajinasi – Rancangan Untuk Hari Depan Indonesia Merdeka”. ●



NKRI Terbentuk dengan Kesukarelaan

Pada Jumat (19/5), Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memaparkan pada sesi wawancara The Geopolitical Overview dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, disampaikan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia belum selesai. “Transisi demokrasi akan selesai dan mencapai konsolidasi demokrasi apabila semua warga percaya kepada demokrasi dan dalam mencari solusi menggunakan kaidah-kaidah demokrasi.

Masyarakat kita masih banyak yang mencari penyelesaian di luar kaidah demokrasi”, ujar Gubernur Agus. Dia melanjutkan bahwa dalam transisi demokrasi, banyak yang harus dibenahi yaitu terkait proses yang publik atau komunitas internasional ingin melakukannya dalam waktu singkat. Selain itu Indonesia juga harus belajar tentang penegakan supremasi hukum sebagai salah satu pilar demokrasi.

Gubernur Agus menyatakan dengan tegas bahwa NKRI tidak terbentuk dengan pemaksaan, semua dengan kesukarelaan. Kecepatan aspirasi dalam masyarakat mendahului

pembangunan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. “Seperti revolusi teknologi (IT) membuat kita terkejut dan harus segera memulihkan kembali kesadaran diri untuk merespon hal itu karena semua elemen mempunyai kontribusi dalam transisi demokrasi”, ungkap Agus Widjojo.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Dorodjatun KuntjoroJakti, Guru Besar Emeritus Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menegaskan hal yang sama tentang kesukarelaan yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. “Cara Indonesia berdiplomasi mencerminkan hal itu. Indonesia tidak membedakan mana negara besar dan kecil atau tendensi negara tetangga. Itu sesuai dengan konstitusi. Kita menghargai perbedaan, tidak memusuhi siapapun hanya karena perbedaan”, tutur Dorodjatun.

Guru Besar ini menegaskan ke depan perbedaan bukan akan berkurang tetapi akan semakin banyak, apalagi dengan adanya IT yang mudah menyebarkan segala informasi. Oleh karena itu perbedaan harus bisa diterima dengan biasa, tidak boleh dipaksakan, berikan argumen yang positif. “Seperti politik luar negeri (polugri) Indonesia terutama di ASEAN, banyak capaian diraih karena sabar dalam berargumen”, ungkap Dorodjatun. ●

Chatib Basri: ASEAN Kemungkinan Hadapi Fenomena *New Normal Economy*



Chatib Basri dalam Sesi *Development in The Global Economy* pada Jakarta Geopolitical Forum pada Jumat (19/5) mengatakan bahwa ASEAN akan menghadapi fenomena *New Normal*. Situasi perekonomian dunia yang semakin tidak menentu, lanjut Chatib Basri, membuat sejumlah kalangan ekonom mempopulerkan istilah baru, yaitu *New Normal Economy*.

“Situasi di mana ketidakpastian ekonomi dan ancaman krisis menjadi sesuatu pemandangan yang lumrah dan siklus krisis yang cepat menjadi suatu yang biasa,” Kata Chatib Basri di Hotel Borobudur, Jakarta

Fenomena *New Normal Economy* menurut Chatib Basri dihadapi beberapa negara barat pasca krisis finansial 2007-2008, serta kondisi ekonomi dunia pasca resesi ekonomi 2008-2012. Belakangan ini menurutnya fenomena tersebut mulai dialami oleh Tiongkok.

“Tiongkok baru mulai mengalami fenomena ini tahun 2012. Berbeda dengan Eropa yang sudah mengalami fenomena *New Normal Economy* sejak tahun 2008,” ungkap mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia di era SBY ini.

Ia memaparkan bahwa fenomena *New Normal Economy* di Tiongkok mulai berkembang karena beberapa hal. Salah satu diantaranya menurut Chatib terjadi pasca Brexit, kebijakan Proteksionis di Era Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kebijakan ekspansi dan normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan negeri Paman Sam tersebut.

Hal tersebut senada dengan pendapat Danny Quah, Pengamat Ekonomi berkebangsaan Singapura yang mengatakan bahwa munculnya fenomena *New Normal Economy* ini membuat banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap perekonomian dunia. “Fenomena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan merambah ASEAN karena kondisi ekonomi dunia setelah krisis finansial 2008 belum benar benar pulih,” ujar Quah.

Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat dinilainya tetap akan memegang peranan dominan di kawasan Asia Pasifik. Disatu sisi cadangan valuta asing Tiongkok sudah mulai menurun dan fenomena ini berlanjut sampai beberapa bulan lalu.

“Tiongkok sebagai pemimpin ekonomi Asia membawa hasil tidak baik bagi tetangga-tetangganya,” ujar Quah. Disatu sisi menurut Quah kepemimpinan Amerika Serikat di kawasan Asia akan tetap eksis.

Oleh karena itu menurutnya Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pada kegiatan ekspor ke Tiongkok, justru harus secepatnya mengambil manfaat sebesar besarnya dari Tiongkok.

Solusinya menurut Chatib Indonesia harus mengembangkan SDM yang berkualitas dan tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah seperti yang terjadi selama ini.

“Indonesia perlu untuk mengambil untung dari Tiongkok, bukan hanya menjual bahan mentah seperti yang terjadi selama ini agar tidak terlalu terdampak fenomena *New Normal Economy* yang akan dihadapi ke depan di kawasan ASEAN,” ujar Chatib. ●

Oleg N. Barabanov: Tiongkok Sebagai Gerbang Utama Asia Pasifik



Profesor asal Rusia Oleg N. Barabanov mengatakan, Tiongkok merupakan gerbang utama Rusia memasuki kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut diungkapkan pada sesi *Global Peace and Security* dalam Jakarta Geopolitical Forum di Hotel Borobudur, Jakarta. Barabanov mengatakan bahwa menguatnya peran Rusia di kawasan Asia Pasifik membuat peranan Rusia mulai diwaspadai, terutama oleh negara-negara Uni Eropa.

Guru besar dari Universitas Moskwa International University ini mengungkapkan bahwa sejak 2008 Rusia dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengembangan daerah Pantai Pasifik Rusia dan Pantai Timur Tiongkok. “Sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mulai berkembang di daerah Asia, jadi wajar bila kemudian Rusia mulai terlibat di daerah Asia Pasifik”, ujar Barabanov.

Lebih lanjut Barabanov menjelaskan bahwa divisi Asia Timur Kementerian Perdagangan Rusia telah membentuk zona-zona investasi untuk area Asia Timur pasca terjalannya kerjasama Rusia dan Tiongkok. “Kita telah mengembangkan beragam

investasi di Tiongkok, mulai dari bidang pangan, ketahanan energi, dan pertahanan keamanan”, ujar Barabanov.

Selain itu menurut Barabanov, saat ini Tiongkok bersama dengan Rusia tengah mengembangkan kerjasama ekonomi lebih jauh lagi, melalui *Eurasian Economic Union (EAEU)*, sebuah Uni yang dikembangkan di antara negara-negara bekas Soviet (Belarusia, Kazakhstan, Rusia, Armenia dan Kirgistan) dengan mendukung proyek Jalur Sutra Baru atau dikenal dengan *One Belt One Road* yang digagas oleh Presiden Xi Jin Ping.

“Dua tahun yang lalu kita telah sepakat dengan Tiongkok untuk menghubungkan daerah Eurasia bekas Soviet dengan *One belt and One road Initiative*. Vladimir Putin bahkan menghadiri forum *One Belt and One Road Initiative* di Beijing”, ujar Barabanov.

Barabanov menambahkan Rusia sangat memperhatikan pengembangan EAEU karena asosiasi telah membuat kemajuan serius dalam membentuk dan memperkuat pasar bersama. Kegiatan EAEU telah mengimbangi dampak kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan pada ekonomi negara-negara yang berpartisipasi. ●

Satoru Mori: Indonesia Sudah di Jalan yang Benar



Jumat (19/5), Pada Sesi *Global Peace and Security*, Jakarta Geopolitical Forum yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Satoru Mori, Profesor Emiritus dari Universitas Tokyo menyatakan bahwa perubahan geopolitik pasca Perang Dingin membuat terjadinya masalah dan juga ancaman yang mengancam stabilitas dunia internasional. Pengamat Geopolitik ini menjelaskan dalam Jakarta Geopolitik Forum (JGF) di Jakarta bahwa ancaman tersebut diakibatkan kasus terorisme yang semakin marak terjadi, krisis pengungsi di Eropa, masalah Brexit, menguatnya sentimen konservatif dan proteksionis, pemanasan global, serta ancaman rudal Korea Utara.

“Korea Utara sengaja meluncurkan rudal agar memancing Amerika Serikat ke meja perundingan, sebuah masalah yang harusnya sudah selesai sejak lama”, ujar Mori. Namun, Mori menegaskan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar. “Indonesia fokus kepada pembangunan infrastruktur, dan saya berharap Indonesia harus dapat melakukan lebih daripada itu”, ungkap Mori.

Mori menilai saat ini Indonesia harus fokus pada pendidikan, sehingga Indonesia dapat mengembangkan produk-produk berteknologi tinggi agar dapat bergabung dengan deretan negara-negara kekuatan ekonomi dunia. Mori menjelaskan kedepannya Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam

ekonomi dunia.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekjen China Institute of International Studies (CIIS), Yang Yi. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus dapat memainkan peranan penting dalam dunia internasional. “Indonesia negara ASEAN satu-satunya yang masuk G20. Kita bisa bekerjasama dalam bidang ekonomi. Terutama dalam bidang maritim, “ ujar Yang Yi. Yang Yi berharap Indonesia dengan Tiongkok dapat berperan lebih jauh di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Yang Yi pun mengatakan bahwa Indonesia dengan Tiongkok selama ini telah terjalin kerjasama yang baik. “Salah satunya kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung” ungkap Yang Yi. Kendati demikian ia mengakui masalah Laut Tiongkok Selatan membuat negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia bersitegang dalam hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Namun menurutnya masalah itu dapat diselesaikan dengan segera. Yang Yi mengatakan persoalan Laut Tiongkok Selatan, sudah dibahas Presiden Jokowi tatkala bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing minggu lalu.

Mereka membicarakan masalah pertahanan dan keamanan, termasuk kerjasama dalam pengamanan Laut Tiongkok Selatan. “Presiden Jokowi akan mengajak negara-negara ASEAN untuk turut membicarakan masalah tersebut,” kata Yang Yi. ●



Mohammad Aboelfadl : Pendidikan Kunci Tangani Ekstremisme

Pada Sabtu (20/5), Jakarta Geopolitical Forum (JGF) diawali dengan Sesi *Extremism, Radicalism, and Terrorism*. Dalam sesi tersebut, salah satu narasumber, Mohammad Aboelfadl yang merupakan Pemimpin Redaksi Koran Al-Ahram mengatakan bahwa masalah ekstremisme di Mesir maupun di Indonesia telah berkembang pada taraf yang mengkhawatirkan. Beberapa penyebab munculnya gerakan ekstremis itu, lanjut Aboelfadl, adalah ketidakadilan, kemiskinan dan kurangnya sikap toleransi. Lebih lanjut, jurnalis asal Mesir tersebut menjelaskan bahwa mulanya pemerintah Mesir telah menggunakan cara-cara represif untuk menekan ekstremisme, namun cara tersebut tidak tepat dan mendapatkan perlawanan. Aboelfadl berpendapat, perlu cara lain untuk menangani ekstrimisme.

Dalam menangani masalah ekstremisme dan terorisme Mohammad Aboelfadl memiliki solusi menggunakan pendekatan non-represif. “Menguatnya gerakan ekstremisme karena disebabkan oleh masalah kemiskinan, ketidakadilan, budaya terutama budaya toleran. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menciptakan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Langkah ini sudah dimulai oleh pemerintah Mesir, mulanya Mesir mengalami masalah dengan ekstremisme. Namun pemerintah sekarang sudah berusaha untuk mengubah kurikulum, agar menciptakan budaya toleran. Hal ini pertama

dimulai oleh lembaga pendidikan tinggi Mesir, seperti Universitas Al-Azhar,” ujar jurnalis berdarah Mesir tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh pembicara Rüdiger Lohlker. “Untuk menangani masalah ekstremisme dan terorisme, yang makin lama makin pintar dan strategis, perlu digunakan langkah-langkah strategis pula untuk menangkai penyebarannya,” ujar peneliti asal Austria tersebut. Perlunya menangkai ekstremisme juga disampaikan oleh Lina Khatib, peneliti berdarah Lebanon tersebut juga menyampaikan perlunya cara-cara non represif. “Untuk menangkai ekstremisme, terutama yang berasal dari Irak dan Suriah perlu diketahui masalahnya. Mengapa orang-orang mau bergabung ke ISIS,” jelas Lina Khatib. ●

“

Menguatnya gerakan ekstremisme karena disebabkan oleh masalah kemiskinan, ketidakadilan, budaya terutama budaya toleran

Arif Havas Oegroseno: Perubahan Iklim Perlu Diwaspadai



Isu perubahan iklim yang terjadi hingga hari ini merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di tingkat global. Kekhawatiran akan masalah lingkungan tersebut yang kemudian membuatnya dikaji dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) pada sesi ke-5 dengan tema *The Environment and Climate Change* pada Sabtu (20/8) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Masalah perubahan iklim dipandang perlu untuk dijadikan salah satu topik pada JGF karena dampak dari perubahan iklim di tingkat dunia hingga ke Indonesia sudah mulai terlihat. Daerah Artik yang sebelumnya tidak bisa dilalui oleh kapal, sekarang sudah mulai dapat dilewati oleh kapal.

Kanada, menurut Peneliti berkebangsaan Kanada Leonard J. Edwards, tengah menghadapi ancaman perubahan iklim. Lokasi geografis Kanada yang berbatasan langsung dengan wilayah Artik membuat Kanada melihat mencairnya es di Kutub Utara sebagai ancaman terhadap geopolitik mereka.

Kendati demikian, Kanada telah mulai melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan iklim seperti usaha untuk mengembangkan energi terbarukan. Tidak hanya itu, menurut peneliti asal Kanada ini, pemerintah Kanada telah melakukan upaya serius dalam mengedepankan isu perubahan iklim di tingkat regional dan global.

Menurut Edwards, seperti halnya Kanada, kondisi geopolitik Indonesia mulai terancam dengan adanya perubahan iklim. Di Indonesia sendiri perubahan iklim sudah mencapai taraf yang

“

Kondisi geopolitik Indonesia mulai terancam dengan adanya perubahan iklim. Di Indonesia sendiri perubahan iklim sudah mencapai taraf yang mulai mengkhawatirkan. Mulai dari adanya kebakaran hutan, banjir, longsor, abrasi, hingga kekeringan.

mengkhawatirkan. Mulai dari adanya kebakaran hutan, banjir, longsor, abrasi, hingga kekeringan.

Di tempat yang sama, Deputy Menko Maritim Republik Indonesia Havas Oegroseno menjelaskan bahwa masalah lingkungan berpotensi menjadi ancaman geopolitik Indonesia. Ia memaparkan hal ini mulai terlihat dengan adanya abrasi di Pulau Rangsang, Riau. Pulau yang berbatasan dengan Selat Malaka tersebut telah menjadi pulau dengan abrasi terparah di Indonesia.

Selain itu, mantan Duta Besar

Indonesia untuk Uni Eropa ini memaparkan bahwa petani di Karawang dan Indramayu tengah berjuang untuk menghadapi abrasi air laut yang menyerang sawah-sawah mereka. Havas juga menyayangkan kawasan Asia Tenggara yang tengah menghadapi ancaman perubahan iklim namun tidak juga menyelenggarakan konferensi untuk membahas masalah tersebut. ASEAN, di sisi lain, telah melaksanakan konferensi dengan beragam tema mulai dari ekonomi, politik, terorisme, perdagangan. ●

Nurşin Ateşoğlu Güney: Para Pengungsi harus Diberdayakan



Permasalahan pengungsi kini menjadi tantangan yang tengah dihadapi berbagai negara di dunia. Hal tersebut diungkapkan Profesor Nurşin Ateşoğlu Güney dari Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey dalam Jakarta Geopolitical Forum yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta dalam sesi *Migrants and Refugeese* pada Sabtu (20/5).

Güney mengatakan, seperti halnya di Benua Eropa yang tengah menghadapi limpahan pengungsi dari berbagai negara konflik di Timur Tengah, Indonesia dinilai akan menghadapi kedatangan pengungsi walaupun tidak dalam skala besar seperti negara-negara Uni Eropa.

Menurutnya, para pengungsi yang akan datang perlu untuk diberdayakan dengan diberikan standar hidup yang lebih baik dan tidak ditelantarkan serta diberi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Para pengungsi, jelas Güney, seringkali membentuk kantong-kantong mereka sendiri di setiap tempat, seperti yang juga dialami oleh Turki. Hal tersebut akan berakibat buruk bila para pengungsi ini tidak diberdayakan dengan memberikan pendidikan dan difasilitasi dengan baik.

Perbedaan latar belakang budaya dan agama para pengungsi dengan negara tujuan biasanya menurut Güney

seringkali memicu sejumlah prasangka terhadap para pengungsi. Akibatnya tidak jarang para pengungsi mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Mengambil studi kasus pengungsi Rohingnya, ujar Güney, tantangan bagi Indonesia tidak terlalu berat. Para pengungsi Rohingnya yang saat ini diterima oleh Indonesia kendati berbeda budaya dengan penduduk Indonesia, namun mereka menganut agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Berbeda dengan yang dihadapi oleh negara-negara Uni Eropa, para pengungsi ini memiliki bukan saja latar belakang budaya yang berbeda namun juga agama yang berbeda.

Hal senada dengan Nurşin Güney disampaikan oleh Alistair Boulton. Boulton mengatakan bahwa para pengungsi sudah pasti jadi warga negara kelas dua di negara tempat mereka mengungsi. Asisten Perwakilan UNHCR untuk Thailand tersebut menyatakan walaupun pengungsi seringkali jadi warga negara kelas dua dan mengalami diskriminasi, para pengungsi seharusnya tetap mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara tempat mereka mengungsi. Alistair Boulton berpendapat bahwa pengungsi seharusnya tidak mengalami diskriminasi. Para pengungsi, jelas Alistair Boulton, diperlakukan sama dan diberdayakan dengan diberi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. ●